

KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI NELAYAN TRADISIONAL PANTAI UTARA JAWA BARAT DAN DAERAH KHUSUS JAKARTA (*Socio Economy Characteristics Of Traditional Fisherman in The North Coast Of West Java And Daerah Khusus Jakarta*)

Lalu Solihin¹, Eha Hasni Wahidhani²

¹Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa bangsa

²Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Bangsa

Corresponding Author: lalu.solihin@unb.ac.id

Abstract

People living on small islands and coastal areas generally rely on marine products for their livelihoods, either as fishermen, fishing laborers, or marine tourism services. The occupation of coastal communities as fishermen is inherited from their parents. Dependence on marine resources is very high, with limited fishing technology, causing the results obtained are not optimal. Income from fishing, which is sometimes uncertain, is a serious problem for fishing communities in achieving welfare. Sometimes the income is smaller than the expenditure, trapping the community into poverty. The purpose of this study is to describe the characteristics of coastal communities from the socio-economic aspects of coastal communities in DKI Jakarta and Pantura West Java. The data analysis method used is descriptive statistical analysis method. The results showed that most of the fishermen in DKI Jakarta and Pantura West Java are traditional fishermen. The education level of the current generation of fishermen is relatively higher than that of the previous generation with a maximum of elementary school graduates, while the next generation of fishermen will be even better with a minimum of high school graduates. The limited job opportunities for coastal communities have forced them to become fishermen with only physical capital, even though they realize the risks of being a fisherman are very high. For fishermen who do not have their own capital to buy fleets and fishing gear, they are forced to rely on middlemen as a source of capital, citing an easier and faster process.

Keywords: Socio Economy Characteristics, Traditional Fishermen, Pantura West Java, Special Capital Region of Jakarta

Ringkasan

Masyarakat yang tinggal di wilayah pulau-pulau kecil dan pesisir pantai umumnya mengandalkan hidupnya dari hasil laut, baik sebagai nelayan, buruh nelayan, ataupun jasa wisata bahari. Pekerjaan masyarakat pesisir seperti sebagai nelayan merupakan warisan dari orang tua mereka. Ketergantungan terhadap sumberdaya kelautan sangat tinggi, dengan keterbatasan teknologi penangkapan yang terbatas, menyebabkan hasil yang diperoleh tidak optimal. Penghasilan dari melaut yang kadang-kadang tidak menentu ini menjadi masalah serius bagi masyarakat nelayan dalam mencapai kesejahteraan. Pendapatan yang lebih kecil dibanding dengan pengeluaran menjebak masyarakat kedalam kubangan kemiskinan. Tujuan dan penelitian ini adalah untuk menggambarkan karakteristik masyarakat pesisir dari aspek sosial ekonomi masyarakat pesisir DKI Jakarta dan Pantura Jawa Barat. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nelayan di DKI Jakarta dan Pantura Jawa Barat adalah nelayan tradisional. Tingkat pendidikan nelayan generasi saat ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya maksimal tamat SD, sedangkan nelayan generasi berikutnya akan lebih baik lagi minimal tamat SLTA. Keterbatasan lapangan kerja baru masyarakat pesisir menyebabkan mereka terpaksa menjadi nelayan yang hanya bermodal fisik, meski mereka sadar risiko sebagai nelayan sangat besar. Bagi nelayan yang tidak punya modal sendiri untuk membeli armada dan alat tangkap untuk melaut, terpaksa bergantung pada tengkulak sebagai sumber permodalan, dengan alasan proses lebih mudah dan cepat.

Kata kunci: Karakteristik Ekonomi, Nelayan Tradisional, Pantura Jawa Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PENDAHULUAN

Ikan merupakan salah satu hewan laut yang memiliki fungsi penting bagi pemenuhan gizi manusia. Selain sebagai bahan pangan, ikan juga berperan dalam siklus rantai makanan, dan komoditas objek wisata. Potensi perikanan yang dimiliki diperkirakan menghasilkan 6,4 juta ton setiap tahunnya yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI (Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia). Wilayah kelautan Indonesia merupakan wilayah *marine megabiodiversity*, yang memiliki keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia, memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang. Kekayaan laut yang dimiliki Indonesia sebagai peluang yang sangat besar bagi negara untuk dikembangkan, dalam konteks untuk kepentingan rakyat. (Dahuri, Ginting, Jacob, & Rais, 2008).

Laut Jawa tidak hanya kaya akan ikan yang dimanfaatkan oleh nelayan sekitar sebagai lokasi penangkapan ikan (*fishing ground*), tapi juga kaya dengan sumberdaya pertambangan minyak dan gas, jasa transportasi laut yang menghubungkan antar pulau di nusantara baik untuk angkutan barang maupun orang. Di beberapa titik juga terdapat kawasan wisata bahari yang potensial maupun aktual. Sedangkan di sepanjang garis pantai banyak dimanfaatkan sebagai lokasi budidaya ikan atau hewan laut lainnya, sehingga jika dimanfaatkan semua dengan optimal akan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sekitarnya.

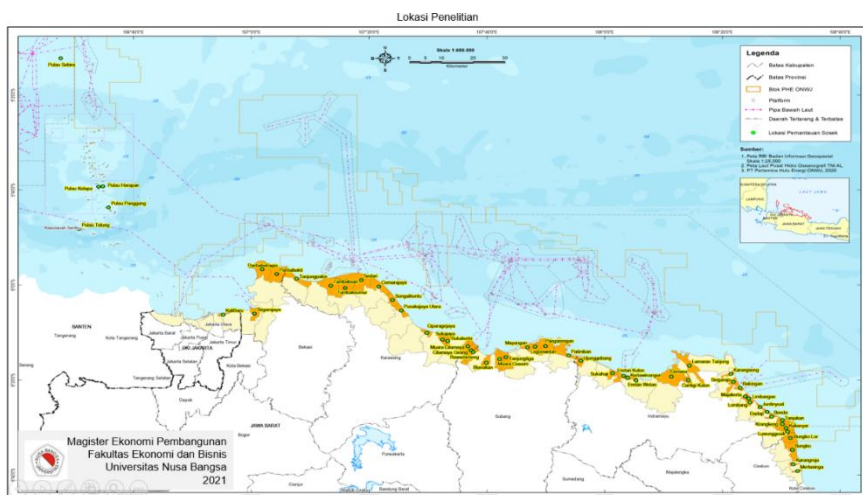
Secara umum, kehidupan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan ataupun buruh nelayan tradisional. Kemampuan mereka memenuhi kehidupan dasar minimal kehidupan sehari-hari sangat terbatas. Menurut Martadiningrat (Goso & Anwar, 2017), sebanyak 90 % dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia masih di bawah garis kemiskinan. Miskin menurut Badan Pusat Statistik didefinisikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup para nelayan baik makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Ada dua faktor penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan yaitu faktor struktural disebabkan oleh faktor atau variabel internal individu yaitu struktur sosisl ekonomi masyarakat, ketersediaan *insentif* atau *disinsentif* pembangunan, ketersediaan fasilitas, teknologi, dan sumber alam (Anwar & Wahyuni, 2019). Kebijakan pengentasan kemiskinan sering gagal akibat kurang akuratnya data yang dimiliki, sehingga program pengentasan menjadi tidak tepat sasaran. Pemetaan sosial ekonomi masyarakat dalam suatu wilayah sangat penting guna membuat kebijakan yang efektif, efisien dan optimal. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan dan menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, khususnya nelayan yang tinggal di Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan nelayan di pesisir pantai utara (Pantura) Jawa Barat.

METODOLOGI PENELITIAN

a. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan April Tahun 2021. Sedangkan lokasi pelaksanaan kegiatan berada di Kabupaten Kepulauan Seribu Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon yang ada di Pantai Utara Jawa Barat. Lokasi ini diambil karena masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir sebagian besar mengandalkan hidupnya dari hasil laut, baik sebagai nelayan, buruh nelayan, pedagang hasil laut, pengolah hasil laut, atau pembudidaya perikanan.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

b. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan dengan cara studi pustaka dan wawancara langsung kepada masyarakat yang berpedoman pada kuesioner yang sudah disiapkan sebelumnya. Responden terdiri dari nelayan tradisional, buruh nelayan, dan juragan nelayan.

c. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya

dan dari instansi terkait. Sedangkan data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan responden. Jumlah responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 116 orang responden yang berasal dari nelayan Kepulauan Seribu Provinsi DKI dan nelayan Pantura Jawa Barat.

d. Pengolahan Data

- 1) Kompilasi data sekunder yang menyangkut seluruh data produksi perikanan dan alat tangkap ikan nelayan, kemudian di sandingkan dengan data primer hasil wawancara dengan nelayan.
- 2) Editing dan pemeriksaan dokumen dari data produksi perikanan dan alat tangkap yang digunakan nelayan, guna mengantisipasi jika terdapat data yang ekstrim sehingga perlu dilakukan pemeriksaan. Jika terdapat data yang tidak valid selanjutnya perlu dilakukan konfirmasi kepada pihak instansi terkait.

e. Metode Analisis

Metode analisis data untuk menjawab tujuan adalah dengan menerapkan metode analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menentukan deskripsi kondisi sosial ekonomi masyarakat nelayan di Kepulauan DKI dan nelayan di Pantai utara Jawa Barat. Menurut Suryoatmono (Nasution, 2017). Statistika deskriptif adalah statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Nelayan

Berdasarkan alat tangkap yang digunakan, nelayan DKI Jakarta dan Pantura Jawa Barat secara umum tergolong nelayan tradisional. Nelayan tradisional dalam kajian ini adalah nelayan yang memiliki kapasitas armada 5-10 GT (Gross Tonnage) ke bawah dan jumlah anak buah kapal (ABK) antara 10-20 orang. Sedangkan nelayan modern adalah nelayan yang memiliki peralatan yang modern dan kapasitas armada yang lebih besar dengan nelayan tradisional. Ada juga yang mengklasifikasikan nelayan berdasar teknologi yang digunakan seperti (Sabihaini, Pratomo, Rustamaji, & Sudaryatie, 2020), dimana nelayan tradisional menggunakan teknologi penangkapan yang sederhana dengan peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia.

Ada dua jenis kelompok nelayan yang ada di Pantura yaitu nelayan melakukan penangkapan secara berkelompok dan nelayan yang melakukan penangkapan secara perorangan. Nelayan yang berkelompok terdiri dari 2 sampai 25 orang. Mereka membawa kapal milik juragan (pemilik kapal) setelah dilengkapi dengan perbekalan dan BBM. Setiap anggota kelompok memiliki tugas masing-masing sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Begitu juga dengan hasil tangkapan dibagi secara proporsional sesuai dengan peran dan tanggungjawab dalam setiap kegiatan penangkapan.

Nelayan perorangan umumnya adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan seorang diri dan arena penangkapannya tidak jauh dari pesisir. Alat tangkap yang digunakan juga terbatas, sehingga tidak semua jenis ikan bisa ditangkap. Umumnya mereka adalah nelayan sekaligus pemilik kapal, sehingga hasil tangkapannya juga bisa bebas dijual kemana saja mereka mau. Apalagi dilokasi nelayan tersebut tidak tersedia fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), maka hasil tangkapan dijual ke pengepul atau toke setempat, walau harganya sedikit lebih murah dibandingkan dijual di TPI.

Berbeda halnya dengan nelayan berkelompok, mereka umumnya adalah pekerja yang membawa kapal milik juragan dengan system bagi hasil. Semua biaya operasional (bahan bakar dan perbekalan) ditanggung oleh pemilik kapal. Sebelum bagi hasil, pemilik kapal akan memotong biaya operasional yang sudah dikeluarkan sebelumnya, baru kemudian sisanya dibagi kepada pemilik kapal dan seluruh anak buah kapal (ABK). Jika hasil tangkapan tidak menutupi biaya operasional atau malah tidak dapat ikan satupun, maka mereka tidak diwajibkan mengganti biaya operasional.

Berdasarkan jenis ikan yang ditangkap, nelayan di DKI Jakarta dan Pantura Jawa Barat termasuk nelayan *multi species*, atau nelayan yang memiliki kemampuan dan keahlian menangkap semua jenis ikan yang ada di perairan sekitarnya. Sisanya adalah nelayan *single species* yang hanya menggunakan satu jenis alat tangkap atau hanya spesialis menangkap satu jenis ikan saja. Artinya bahwa sebagian besar nelayan DKI Jakarta dan Pantura Jawa Barat menangkap ikan disesuaikan dengan musim lalu dan dengan alat tangkap yang *compatible*. Ketika musim rajungan, mereka ramai-ramai menangkap rajungan, Ketika musim udang, mereka menggunakan alat tangkap atau jaring udang, Ketika musim tongkol, maka nelayan yang punya alat tangkap tongkol bersiap-siap menangkap tongkol, dan seterusnya.

Berdasarkan data DKP Provinsi Jawa Barat, nelayan dapat dikelompokkan menjadi tiga yang kelompok nelayan kecil dengan kapasitas kapal 1 GT, nelayan menengah dengan kapasitas kapal di atas 1 GT hingga 10 GT, sedangkan nelayan di atas 100 GT tidak menjadi obyek penelitian karena jumlahnya yang terbatas dan wilayah operasinya di luar laut Jawa (lihat tabel 1). Nelayan besar maupun nelayan menengah ini ada yang berstatus sebagai buruh nelayan (ABK) dan ada juga yang milik sendiri dan mengoperasikan sendiri kapalnya. Nelayan kecil maupun nelayan menengah ini ada yang dimodali oleh juragan sendiri, dan ada juga yang memperoleh modal melaut dari bakul (istilah lain untuk pedagang pengepul). Nelayan yang memperoleh modal melaut dari bakul memiliki kewajiban untuk menjual ikan hasil tangkapannya kepada bakul. Meskipun ada beberapa jenis ikan tertentu saja yang mau diterima, selebihnya nelayan bebas menjualnya ke mana saja, termasuk ikut lelang di TPI.

Tabel 1 Kapasitas Armada Kapal Nelayan di Pantura Jawa Barat

Jenis Alat Tangkap	Kab. Indramayu	Kab Bekasi	Kab Cirebon	Karawang	Kota Bekasi	Subang
PTM	210					

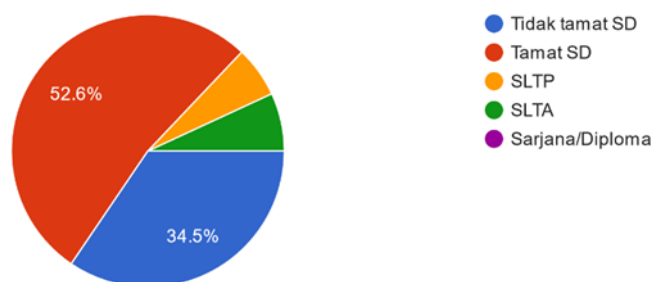
NTP	0		0		
MT 5-10 GT			667		15
MT 20-30 GT					3
MT 10-20 GT					4
MT < 5 GT	340	798	6112	1615	24
KM 5-10 GT	912				9
KM 50-100 GT	30				
KM 30-50 GT	116		1		
KM 20-30 GT	667		3		8
KM 10-20 GT	650		11		7
KM < 5 GT	1575				4

Sumber: (DKP, 2022)

Kapal-kapal nelayan umumnya disimpan di sekitar muara sungai, sekaligus sebagai tempat pelelangan ikan. Ada muara yang di dilengkapi dengan fasilitas TPI, ada juga yang tidak dilengkapi fasilitas TPI. Muara yang tidak dilengkapi TPI umumnya jumlah nelayannya sedikit, namun ada juga muara yang dulu memiliki TPI, kini tidak ada lagi, bisa jadi karena pengurusnya tidak pandai dalam mengelola organisasi usaha pada tingkat nelayan ini.

2. Pendidikan Nelayan

Berdasarkan tingkat pendidikan, nelayan yang ada di pesisir pantura masih didominasi oleh nelayan dengan tingkat pendidikan tamat Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 54%. Tingkat pendidikan terbanyak kedua adalah tidak tamat SD yaitu sebanyak 34%.



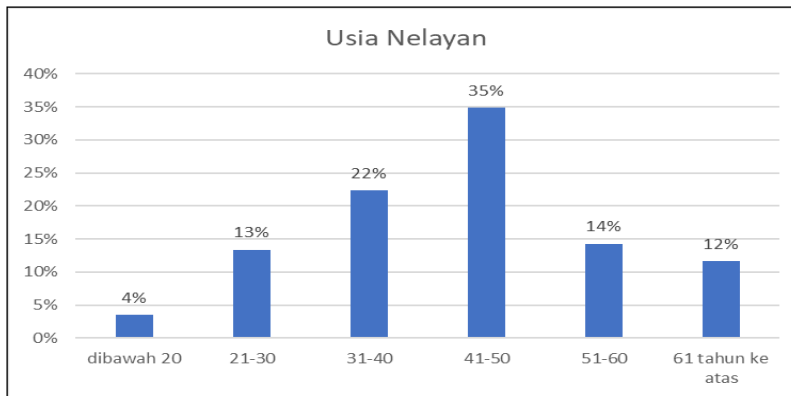
Gambar 2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Nelayan

Umumnya nelayan yang berpendidikan rendah adalah nelayan yang saat ini berusia 45 tahun ke atas. Rendahnya tingkat pendidikan nelayan ini disebabkan karena kala itu, orang tua mereka mengalami keterbatasan ekonomi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, akses menuju ke sekolah yang cukup jauh, dan tidak ditunjang oleh ketersediaan transportasi yang memadai. Adapun yang sudah menamatkan pendidikan jenjang SD, mereka kesulitan melanjutkan ke jenjang SLTP karena mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai ke lokasi sekolah. Sedangkan alat transportasi umum yang tersedia untuk melayani angkutan dari tempat tinggal menuju lokasi sekolah sangat terbatas. Hal ini membuat mereka menjadi malas sekolah dan lebih memilih ikut bekerja melaut yang sudah jelas mendapatkan penghasilan untuk membantu ekonomi orang tua mereka. Tidak seperti saat ini, dimana pilihan transportasi yang cukup banyak memudahkan mengakses ke lokasi pendidikan dengan biaya yang relatif murah, khususnya sekolah negeri.

3. Usia Nelayan

Dari hasil survey menunjukkan bahwa usia nelayan di pesisir pantura adalah antara 41-50 tahun. Usia ini termasuk usia produktif dan tidak lama lagi akan memasuki usia pensiun. Gambar dibawah ini menunjukkan siklus usia nelayan yang dimulai dari usia dibawah 20 tahun dan maksimal diusia diatas 61 tahun. Usia dibawah 20 tahun ini ada yang mulai bekerja sebagai nelayan ketika tamat SD, SMP, dan SLTA. Mereka memilih bekerja sebagai nelayan karena relatif tidak ada peluang kerja lain yang bisa mereka masuki, selain karena peluang kerja disektor formal sangat sedikit dan kalaupun ada, peluang untuk diterima kerja sangat kecil. Ada yang memulai pekerjaannya sebagai nelayan ketika masih berusia 10 tahun, kala itu hanya ikut-ikutan saja melaut pada hari libur sekolah. Umumnya mereka ikut atas keinginan sendiri, meskipun tidak semua orang tua setuju jika

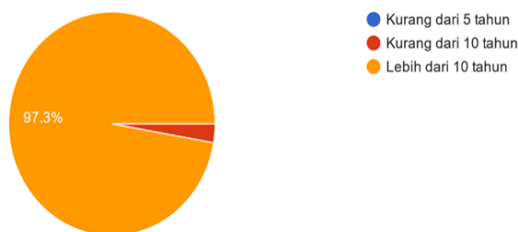
anaknya bekerja sebagai nelayan. Tidak sedikit dari orang tua nelayan berharap anaknya tidak mengikuti jejak mereka sebagai nelayan, karena mereka sadar akan risiko sebagai nelayan sangat besar dan penghasilan yang diperoleh sangat fluktuatif.



Gambar 3. Usia Nelayan

Pekerjaan sebagai nelayan dipilih karena tidak ada banyak pilihan pekerjaan yang lain yang mudah dan cepat. Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal membuat mereka lebih memilih bekerja sebagai nelayan atau buruh nelayan. Pekerjaan ini tidak menuntut *skill* atau keterampilan khusus, hanya bermodalkan keberanian dan fisik yang memadai, mereka sudah bisa menjadi nelayan.

Menurut Putranto, Sudarmo, & Patanda (2023), usia yang paling produktif bagi nelayan untuk melaut adalah pada usia kisaran 35-45 tahun. Lebih atau kurang dari dari itu, risiko bagi nelayan yang melaut sangat besar. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa usia nelayan di Kabupaten Kepulauan seribu hingga Kabupaten Cirebon menunjukkan jumlah nelayan yang berada dibawah dan di atas rentang usia tersebut jumlahnya semakin sedikit.



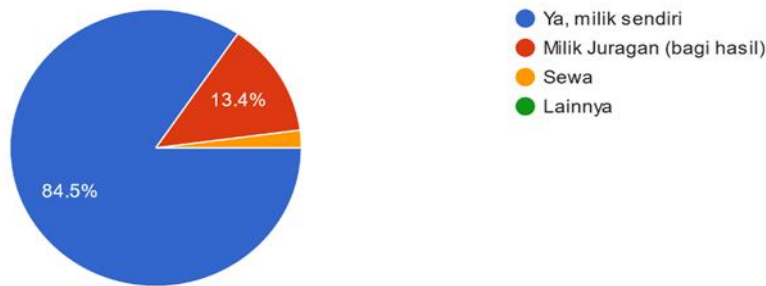
Gambar 4. Lama Bekerja

Gambar diatas menunjukkan bahwa peluang untuk beralih profesi sebagai nelayan sangat kecil. Sebanyak 97% nelayan sudah bekerja sebagai nelayan, dan jumlah yang masuk ke profesi ini terus meningkat. Tidak ada batasan usia untuk bekerja sebagai nelayan, sepanjang mereka masih merasa kuat bekerja, maka mereka akan terus bekerja. Usia nelayan saat ini yang paling dominan adalah usia 41-50 tahun. Mereka yang berada pada usia ini berarti telah memulai pekerjaan sebagai nelayan sejak puluhan tahun yang lalu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Pratama & Zain) karakteristik nelayan tradisional di Kota Surabaya ialah nelayan usia produktif dengan rata-rata usia 44 tahun, dengan tingkat pendidikan 53% tamat SMP, dan status pernikahan nelayan 96% sudah menikah, serta status pelayaran yang merupakan nelayan perorangan dengan persentase 96,3%.

4. Status Kepemilikan

Status kepemilikan alat tangkap terbagi menjadi tiga kelompok yaitu milik sendiri, sewa dari nelayan lain, dan milik juragan. Status kepemilikan ini didominasi oleh milik sendiri. Milik sendiri artinya semua armada dan alat tangkap dibeli dengan uang milik sendiri, baik dengan cara pinjaman atau dari hasil tabungan, maupun dari warisan orang tua. Konsekuensi dari milik sendiri ini adalah semua hasil tangkapan yang diperoleh menjadi hak milik sendiri, dan nelayan memiliki kebebasan untuk menjual kemanapun mereka mau.

Kemudian ada nelayan yang menggunakan armada dan alat tangkap milik orang lain. Jumlah nelayan yang menyewa ini jumlah lebih sedikit dari nelayan yang menggunakan armada milik juragan maupun nelayan yang milik sendiri. Masyarakat nelayan yang tidak memiliki modal finansial untuk membeli alat tangkap, mereka memilih untuk menggunakan alat tangkap milik juragan dengan sistem bagi hasil, atau menyewa armada tangkap milik orang lain dengan perjanjian tertentu.



Gambar 5. Status Kepemilikan Alat Tangkat

Armada dan alat tangkap yang dimiliki nelayan umumnya diperoleh melalui modal sendiri dan pinjaman dari bakul/pengepul yang notabene sebagai pemodal nelayan. Bagi yang tidak memiliki kemampuan *finansial* namun memiliki keinginan punya armada tangkap sendiri. Mereka dengan mudah mendapat pinjaman dari bakul, dengan syarat ikan hasil tangkapan mereka harus jual kepada bakul, sampai jumlah pinjaman lunas baru boleh menjual hasil tangkapan kepada pengepul lain. Sedangkan nelayan yang tidak mau tergantung pada satu pembeli, modal untuk membeli armada tangkap mereka mengupayakan sendiri tanpa melalui bakul/pengepul.

Begitu juga dengan modal operasional melaut, sumber permodalan nelayan terbagi menjadi tiga sumber yaitu modal sendiri, modal dari pedagang bakul (bisa merangkap sebagai juragan), modal dari pinjaman di warung (penjual perbekalan dan bahan bakar minyak (BBM)). Modal dari juragan ini hampir sama dengan modal sendiri, perbedaannya adalah, pada modal sendiri, pemilik kapal adalah nelayan sendiri dan mengoperasikan sendiri. Sedangkan modal dari juragan adalah kapal milik juragan namun diawaki oleh buruh nelayan (ABK).

Nelayan yang memperoleh modal dari bakul memiliki konsekuensi menjual hasil tangkapannya kepada pedagang bakul, tidak boleh jual ke orang lain. Di kampung nelayan tertentu ada yang melarang bakul dari luar masuk untuk membeli ikan ke wilayah tersebut, atau memberi modal nelayan setempat untuk melaut, yang boleh memberi modal nelayan adalah pedagang bakul setempat. Akhirnya harga sangat bergantung pada pedagang bakul, selain tidak ada pelelangan, juga tidak ada harga banding selain harga dari bakul itu sendiri.

Nelayan yang memiliki hubungan *patron-client* dengan bakul merasa lebih nyaman karena ketika mereka membutuhkan bantuan dana untuk kehidupannya sehari-hari dapat terpenuhi dengan hutang kepada bakul. Di sisi lain, nelayan merasa kesulitan karena harga yang ditentukan oleh bakul jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di tempat pelelangan ikan (TPI). Keuntungan lain yang didapatkan adalah adanya kepastian ikan akan terjual apabila berhubungan dengan bakul. Seringkali nelayan yang tidak memiliki hubungan dengan bakul kesulitan dalam menjual hasil tangkapannya

Beda halnya dengan nelayan yang menggunakan modal sendiri, mereka lebih bebas menjual ikan hasil tangkapannya ke mana saja mereka mau, tentunya kepada pembeli yang berani membeli dengan harga yang lebih tinggi. Nelayan yang meminjam uang ke bakul kebanyakan digunakan untuk memperbaiki kapal atau alat tangkap lainnya. Ada juga yang meminjam uang untuk membeli kapal baru beserta mesin dan alat tangkapnya. Ada pedagang bakul yang tidak memiliki kapal sama sekali dan membeli ikan sepenuhnya dari nelayan, ada juga pedagang bakul yang memiliki banyak kapal dan merangkap sebagai juragan. Jika nelayan tersebut ingin pindah ke bakul yang lain yang lebih nyaman, maka nelayan tersebut harus melunasi sisa utang terlebih dahulu, atau dilunasi oleh pedagang bakul yang baru.

Nelayan yang tidak punya uang untuk membeli BBM dan biaya perbekalan, mereka lebih memilih meminjam di warung yang menjual BBM dan perbekalan dari pada meminjam uang kepada pedagang bakul. Mereka tidak punya kewajiban untuk menjual ikan kepada pemberi utang, mereka bebas menjual hasil tangkapannya kepada siapa pun, setelah laku baru utang di warung dibayar dengan uang sesuai harga barang yang diambil.

Nelayan yang memperoleh biaya melaut dari juragan adalah para buruh nelayan atau ABK yang tidak memiliki kapal, dan hanya membawa kapal milik orang lain (juragan) dengan sistem bagi hasil. Juragan membiayai semua kebutuhan melaut, kemudian nanti akan digantikan dari hasil ikan yang diperoleh. Sebelum bagi hasil antara juragan dengan ABK, juragan terlebih menyisihkan biaya melaut terlebih dahulu, sehingga uang yang dibagi adalah penghasilan bersih setelah dipotong biaya melaut oleh juragan. Adapun tujuan menjual ikan ada tiga tipe yaitu ada yang menjualnya kepada pelanggan khusus berdasarkan arahan dari juragan, atau atas kehendak nakhoda kapal, ada yang menjual melalui pelelangan khusus, ada yang dibeli langsung oleh juragan yang merangkap sebagai pedagang bakul.

Dari hasil survei diketahui bahwa jumlah nelayan yang menggunakan modal sendiri sama dengan jumlah nelayan yang menggunakan modal dari juragan atau pemilik kapal. Kemudian nelayan yang memperoleh modal dari pedagang bakul sama dengan jumlah nelayan yang memilih mengutang di warung yang menyediakan perbekalan dan BBM.

Di beberapa kampung nelayan yang lain, sumber permodalan ada yang bersumber dari koperasi nelayan, atau lebih dikenal dengan KUD nelayan. Nelayan yang boleh pinjam di KUD adalah nelayan yang terdaftar sebagai anggota koperasi, selain fasilitas pinjaman yang diperoleh, di akhir tahun para anggota juga mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) setiap tahunnya. Sumber modal ini tentunya menjadi salah satu opsi bagi nelayan dalam pemenuhan kebutuhan melautnya. Sebagai anggota koperasi nelayan mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai anggota yang memungkinkan nelayan untuk mendapatkan bantuan permodalan

dan alat tangkap. Meskipun masih sedikit nelayan yang memanfaatkannya, banyak nelayan yang sudah mulai memiliki hubungan yang baik dengan KUD nelayan di wilayah mereka. Permasalahannya, tidak semua kampung nelayan terdapat koperasi nelayan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hidup mati masyarakat sangat tergantung pada sumberdaya laut, 80% menggantungkan hidupnya sebagai nelayan tradisional, meskipun pekerjaan sebagai nelayan tradisional penuh dengan risiko, kapasitas armada yang kecil sangat rentan diterjang badai, dan peluang mendapatkan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang kecil sangat kecil sehingga nelayan tradisional lebih sering gagal daripada berhasil. Namun pekerjaan ini terpaksa dilakukan karena lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat pesisir sangat terbatas. Selain itu, lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang diwariskan oleh lingkungan mereka. Ketersediaan alternatif mata penghasilan masih terbatas di beberapa wilayah di DKI dan Pantura Jawa Barat seperti budidaya ikan, pariwisata bahari, maupun industri pengolahan produk perikanan.

Meskipun terjadi penurunan jumlah nelayan di DKJ, namun volume dan nilai produksi ikan terus meningkat, padahal lokasi penangkapan (*fishing ground*) ikan di wilayah pinggir pantai cenderung menurun akibat berbagai kegiatan industri disekitarnya. DKI Jakarta adalah pusat pemasaran hasil perikanan dari berbagai daerah di Indonesia, selain permintaan yang tinggi, harga juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan harga di daerah asal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Z., & Wahyuni. (2019). Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskinan. *Sosioreligius Nomor IV Volume 1 Juni 2019*.
- Baharudin. (Edisi xi, April 2014). Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan. *Society, Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi*.
- Dahuri, R., Ginting, S. P., Jacub, R., & Rais, J. (2008). *Pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan lautan secara terpadu Edisi ke.5*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- DKP. (2022). *Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022*. Bandung: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.
- DKP. (2022). *Kapasitas Armada Kapal Nelayan di Pantura Jawa Barat*. Bandung: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat.
- Goso, & Anwar, S. M. (2017). Kemiskinan Nelayan Tradisional Serta Dampaknya Terhadap Perkembangan Kumuh. *Jurnal Manajemen*.
- <https://statistik.kkp.go.id>. (n.d.).
- Nasution, L. M. (2017). Statistika Deskriptif. *Jurnal Hikmah*, 49-55.
- Nicholson, W. (2000). *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya. Edisi kedelapan*. Penerbit Erlangga: Penerbit Erlangga.
- Pratama, N. D., & Zain, I. M. (n.d.). Studi Keberlangsungan Matapencarian Penduduk Sebagai Nelayan Tradisional Di Kota Surabaya. *Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya*.
- Putranto, Y., Sudarmo, A. P., & Patanda, M. (2023). Pengaruh Faktor Usia, Pendidikan, Jumlah Anggota Keluarga Terhadap Pendapatan Nelayan Tradisional Kabupaten Cilacap (Studi Kasus: TPI Lengkong dan TPI Menganti Kisik Cilacap). *ALBACORE*, 023-035 .
- Sabihaini, Pratomo, A. H., Rustamaji, H. C., & Sudaryatie. (2020). Analisis Karakteristik Nelayan Tradisional Berdasar Jenis dan Klasifikasi Nelayan, Kelompok Kerja, Jenis Perairan, Teknologi, Aspek Keterampilan Profesi, Sistem Navigasi dan Komunikasi. *Jurnal Eksos*, 29-34.